

PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH OTONOM DI INDONESIA SAMPAI DENGAN TAHUN 2014



**DIREKTORAT
PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
2014**

PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH OTONOM DI INDONESIA SAMPAI DENGAN TAHUN 2014

NO.	NAMA DAERAH OTONOM	DAERAH INDUK	IBUKOTA	UU PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	2	3	4	5	6
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM (UU No. 11 Tahun 2006, sebelumnya bernama Daerah Istimewa Aceh)	PROVINSI SUMATERA UTARA	Banda Aceh (Kep. Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. Des. 52/1/43-43, sebelumnya bernama Kutaraja)	Nomor 24 Tahun 1956	29 Desember 1956
1	Kabupaten Aceh Barat		Meulaboh	Nomor 7 Tahun 1956	14 November 1956
2	Kabupaten Aceh Besar		Jantho (PP No. 35 Tahun 1979, sebelumnya di Kota Banda Aceh)	Nomor 7 Tahun 1956	14 November 1956
3	Kabupaten Aceh Selatan		Tapaktuan	Nomor 7 Tahun 1956	14 November 1956
4	Kabupaten Aceh Timur		Idi Rayeuk (PP No. 5 Tahun 2007, sebelumnya di Kota Langsa)	Nomor 7 Tahun 1956	14 November 1956
5	Kabupaten Aceh Tengah		Takengon	Nomor 7 Tahun 1956	14 November 1956
6	Kabupaten Aceh Utara		Lhoksukon (PP No. 18 Tahun 2003, sebelumnya di Kota Lhokseumawe)	Nomor 7 Tahun 1956	14 November 1956
7	Kabupaten Pidie		Sigli	Nomor 24 Tahun 1956	29 November 1956
8	Kabupaten Aceh Tenggara	Aceh Tengah	Kutacane	Nomor 4 Tahun 1974	4 Juni 1974
9	Kabupaten Aceh Singkil	Aceh Selatan	Singkil	Nomor 14 Tahun 1999	20 April 1999
10	Kabupaten Bireuen		Bireun	Nomor 48 Tahun 1999	4 Oktober 1999
11	Kabupaten Simeulue * (Sebelumnya adalah Kabupaten Administratif Simeulue berdasarkan PP No. 53 Tahun 1996)	Aceh Barat	Sinabang	Nomor 48 Tahun 1999	4 Oktober 1999
12	Kabupaten Aceh Barat Daya	Aceh Selatan	Blangpidie	Nomor 4 Tahun 2002	10 April 2002

NO.	NAMA DAERAH OTONOM	DAERAH INDUK	IBUKOTA	UU PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	2	3	4	5	6
	13 Kabupaten Aceh Tamiang	Aceh Timur	Karang Baru	Nomor 4 Tahun 2002	10 April 2002
	14 Kabupaten Aceh Jaya	Aceh Barat	Calang	Nomor 4 Tahun 2002	10 April 2002
	15 Kabupaten Gayo Lues	Aceh Tenggara	Blangkejeren	Nomor 4 Tahun 2002	10 April 2002
	16 Kabupaten Nagan Raya	Aceh Barat	Suka Makmur	Nomor 4 Tahun 2002	10 April 2002
	17 Kabupaten Bener Meriah	Aceh Tengah	Simpang Tiga Redelong	Nomor 41 Tahun 2003	18 Desember 2003
	18 Kabupaten Pidie Jaya	Pidie	Meureudu	Nomor 7 Tahun 2007	2 Januari 2007
	19 Kota Banda Aceh		--	Nomor 8 Tahun 1956	14 November 1956
	20 Kota Sabang	Aceh Besar	--	Nomor 10 Tahun 1965	14 Juni 1965
	21 Kota Lhokseumawe ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Lhokseumawe berdasarkan PP No. 32 Tahun 1986)	Aceh Utara	--	Nomor 2 Tahun 2001	21 Juni 2001
	22 Kota Langsa ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Langsa berdasarkan PP No. 64 Tahun 1991)	Aceh Timur	--	Nomor 3 Tahun 2001	21 Juni 2001
	23 Kota Subulussalam	Aceh Singkil	--	Nomor 8 Tahun 2007	2 Januari 2007
2.	PROVINSI SUMATERA UTARA	PROVINSI SUMATERA	Medan	Nomor 24 Tahun 1956	29 November 1956
	1 Kabupaten Asahan		Tanjung Balai	Nomor 7 Tahun 1956	14 November 1956
	2 Kabupaten Deli Serdang		Lubuk Pakam (PP No. 7 Tahun 1984, sebelumnya di Kota Medan)	Nomor 7 Tahun 1956	14 November 1956
	3 Kabupaten Karo		Kabanjahe	Nomor 7 Tahun 1956	14 November 1956
	4 Kabupaten Labuhan Batu		Rantau Prapat	Nomor 7 Tahun 1956	14 November 1956
	5 Kabupaten Langkat		Stabat (PP No. 5 Tahun 1982, sebelumnya di Kota Binjai)	Nomor 7 Tahun 1956	14 November 1956
	6 Kabupaten Nias		Gunungsitoli	Nomor 7 Tahun 1956	14 November 1956
	7 Kabupaten Simalungun		Pematang Raya (PP No. 35 Tahun 1979, sebelumnya di Kota Pematang Siantar)	Nomor 7 Tahun 1956	14 November 1956
	8 Kabupaten Tapanuli Selatan		Sipirok	Nomor 7 Tahun 1956	14 November 1956

NO.	NAMA DAERAH OTONOM	DAERAH INDUK	IBUKOTA	UU PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	2	3	4	5	6
9	Kabupaten Tapanuli Tengah		Pandan (PP No. 7 Tahun 1998, sebelumnya di Kota Sibolga)	Nomor 7 Tahun 1956	14 November 1956
10	Kabupaten Tapanuli Utara		Tarutung	Nomor 7 Tahun 1956	14 November 1956
11	Kabupaten Dairi	Tapanuli Utara	Sidikalang	Nomor 15 Tahun 1964	23 September 1964
12	Kabupaten Mandailing Natal	Tapanuli Selatan	Panyabungan	Nomor 12 Tahun 1998	23 November 1998
13	Kabupaten Toba Samosir	Tapanuli Utara	Balige	Nomor 12 Tahun 1998	23 November 1998
14	Kabupaten Humbang Hasundutan		Dolok Sanggul	Nomor 9 Tahun 2003	25 Februari 2003
15	Kabupaten Nias Selatan	Nias	Teluk Dalam	Nomor 9 Tahun 2003	25 Februari 2003
16	Kabupaten Pakpak Bharat	Dairi	Salak	Nomor 9 Tahun 2003	25 Februari 2003
17	Kabupaten Samosir	Toba Samosir	Pangururan	Nomor 36 Tahun 2003	18 Desember 2003
18	Kabupaten Serdang Bedagai	Deli Serdang	Sei Rampah	Nomor 36 Tahun 2003	18 Desember 2003
19	Kabupaten Batu Bara	Asahan	Lima Puluh	Nomor 5 Tahun 2007	2 Januari 2007
20	Kabupaten Padang Lawas Utara	Tapanuli Selatan	Gunung Tua	Nomor 37 Tahun 2007	14 Agustus 2007
21	Kabupaten Padang Lawas		Sibuhuan	Nomor 38 Tahun 2007	14 Agustus 2007
22	Kab. Labuhanbatu Selatan	Labuhanbatu	Kota Pinang	Nomor 22 Tahun 2008	21 Juli 2008
23	Kab. Labuhanbatu Utara		Aek Kanopan	Nomor 23 Tahun 2008	21 Juli 2008
24	Kab. Nias Utara	Nias	Lolofaoso	Nomor 45 Tahun 2008	26 November 2008
25	Kab. Nias Barat		Onolimbu	Nomor 46 Tahun 2008	26 November 2008
26	Kota Medan		--	Nomor 8 Tahun 1956	14 November 1956
27	Kota Pematang Siantar		--	Nomor 8 Tahun 1956	14 November 1956
28	Kota Sibolga		--	Nomor 8 Tahun 1956	14 November 1956
29	Kota Binjai		--	Nomor 9 Tahun 1956	14 November 1956
30	Kota Tanjung Balai		--	Nomor 9 Tahun 1956	14 November 1956
31	Kota Tebing Tinggi		--	Nomor 9 Tahun 1956	14 November 1956
32	Kota Padang Sidempuan ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Padang Sidempuan berdasarkan PP No. 32 Tahun 1982)	Tapanuli Selatan	--	Nomor 4 Tahun 2001	21 Juni 2001
33	Kota Gunungsitoli	Nias	--	Nomor 47 Tahun 2008	26 November 2008

NO.	NAMA DAERAH OTONOM	DAERAH INDUK	IBUKOTA	UU PEMBENTUKAN	TANGGAL
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
3.	PROVINSI SUMATERA BARAT	PROVINSI SUMATERA TENGAH	Padang (PP No. 29 Tahun 1979, sebelumnya di Kota Bukittinggi)	Nomor 61 Tahun 1958	25 Juli 1958
1	Kabupaten Agam		Lubuk Besung (PP No. 8 Tahun 1998, sebelumnya di Kota Bukittinggi)	Nomor 12 Tahun 1956	19 Maret 1956
2	Kabupaten Lima Puluh Kota		Sarilamak (PP No. 40 Tahun 2004, sebelumnya di Kota Payakumbuh)	Nomor 12 Tahun 1956	19 Maret 1956
3	Kabupaten Padang Pariaman		Parit Melintang (PP No. 35 Tahun 1979, sebelumnya di Kota Pariaman)	Nomor 12 Tahun 1956	19 Maret 1956
4	Kabupaten Pasaman		Lubuk Sikaping	Nomor 12 Tahun 1956	19 Maret 1956
5	Kabupaten Pesisir Selatan		Painan	Nomor 12 Tahun 1956	19 Maret 1956
6	Kabupaten Sijunjung (PP No. 25 Tahun 2008, sebelumnya bernama Kabupaten Sawahlunto Sijunjung)		Sijunjung	Nomor 12 Tahun 1956	19 Maret 1956
7	Kabupaten Solok		Aro-Sukarami (PP No. 39 Tahun 2004, sebelumnya di Kota Solok)	Nomor 12 Tahun 1956	19 Maret 1956
8	Kabupaten Tanah Datar		Batu Sangkar	Nomor 12 Tahun 1956	19 Maret 1956
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Padang Pariaman	Tua Pejat	Nomor 49 Tahun 1999	4 Oktober 1999
10	Kabupaten Dharmasraya	Sijunjung	Pulau Punjung	Nomor 38 Tahun 2003	18 Desember 2003
11	Kabupaten Pasaman Barat	Pasaman	Simpang Empat	Nomor 38 Tahun 2003	18 Desember 2003
12	Kabupaten Solok Selatan	Solok	Padang Aro	Nomor 38 Tahun 2003	18 Desember 2003
13	Kota Padangpanjang		--	Nomor 8 Tahun 1956	19 Maret 1956
14	Kota Payakumbuh		--	Nomor 8 Tahun 1956	19 Maret 1956
15	Kota Sawahlunto		--	Nomor 8 Tahun 1956	19 Maret 1956
16	Kota Solok		--	Nomor 8 Tahun 1956	19 Maret 1956
17	Kota Bukittinggi		--	Nomor 9 Tahun 1956	19 Maret 1956

NO.	NAMA DAERAH OTONOM	DAERAH INDUK	IBUKOTA	UU PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	2	3	4	5	6
	18 Kota Padang		--	Nomor 9 Tahun 1956	19 Maret 1956
	19 Kota Pariaman ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Pariaman berdasarkan PP No. 33 Tahun 1986)	Padang Pariaman	--	Nomor 12 Tahun 2002	10 April 2002
4.	PROVINSI JAMBI	PROVINSI SUMATERA TENGAH	Jambi	Nomor 61 Tahun 1958	25 Juli 1958
	1 Kabupaten Batang Hari		Muara Bulian (PP No. 12 Tahun 1979, sebelumnya di Kenali Asem)	Nomor 12 Tahun 1956	19 Maret 1956
	2 Kabupaten Bungo (UU No. 54 Tahun 1999, sebelumnya bernama Kabupaten Bungo Tebo)		Muaro Bungo	Nomor 12 Tahun 1956	19 Maret 1956
	3 Kabupaten Merangin (UU No. 54 Tahun 1999, sebelumnya bernama Kabupaten Salorangun Bangko)		Bangko	Nomor 12 Tahun 1956	19 Maret 1956
	4 Kabupaten Tanjung Jabung Barat (UU No. 54 Tahun 1999, sebelumnya bernama Kabupaten Tanjung Jabung)		Kuala Tungkal	Nomor 12 Tahun 1956	19 Maret 1956
	5 Kabupaten Kerinci		Sungai Penuh	Nomor 58 Tahun 1958	17 Juli 1958
	6 Kabupaten Tebo	Bungo Tebo	Tebo	Nomor 54 Tahun 1999	12 Oktober 1999
	7 Kabupaten Muaro Jambi	Batang Hari	Sengiti	Nomor 54 Tahun 1999	12 Oktober 1999
	8 Kabupaten Sarolangun	Merangin	Sarolangun	Nomor 54 Tahun 1999	12 Oktober 1999
	9 Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Tanjung Jabung	Muarasabak	Nomor 54 Tahun 1999	12 Oktober 1999
	10 Kota Jambi		--	Nomor 9 Tahun 1956	19 Maret 1956
	11 Kota Sungai Penuh	Kerinci	--	Nomor 25 Tahun 2008	20 Juli 2008
5.	PROVINSI RIAU	PROVINSI SUMATERA TENGAH	Pekanbaru (Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Des.52/1/44-25, sebelumnya di Tanjung Pinang, No. Des. 52/4/29-133, sebelumnya Pakanbaru)	Nomor 61 Tahun 1958	25 Juli 1958
	1 Kabupaten Bengkalis		Bengkalis	Nomor 12 Tahun 1956	19 Maret 1956
	2 Kabupaten Indragiri Hulu (UU No. 6 Tahun 1965, sebelumnya bernama Kabupaten Indragiri)		Rengat	Nomor 12 Tahun 1956	19 Maret 1956

NO.	NAMA DAERAH OTONOM	DAERAH INDUK	IBUKOTA	UU PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	2	3	4	5	6
	3 Kabupaten Kampar		Kampar	Nomor 12 Tahun 1956	19 Maret 1956
	4 Kabupaten Indragiri Hilir	Indragiri Hulu	Tembilahan	Nomor 6 Tahun 1965	14 Juni 1965
	5 Kabupaten Kuantan Singingi		Teluk Kuantan	Nomor 53 Tahun 1999	4 Oktober 1999
	6 Kabupaten Pelalawan	Kampar	Pangkalan Kerinci	Nomor 53 Tahun 1999	4 Oktober 1999
	7 Kabupaten Rokan Hulu		Pasir Pangaraian	Nomor 53 Tahun 1999	4 Oktober 1999
	8 Kabupaten Rokan Hilir	Bengkalis	Ujung Tanjung	Nomor 53 Tahun 1999	4 Oktober 1999
	9 Kabupaten Siak		Siak Sri Indrapura	Nomor 53 Tahun 1999	4 Oktober 1999
	10 Kabupaten Kepulauan Meranti		Selat Panjang	Nomor 12 Tahun 2009	16 Januari 2009
	11 Kota Pekanbaru		--	Nomor 8 Tahun 1956	19 Maret 1956
	12 Kota Dumai ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Dumai berdasarkan PP No. 8 Tahun 1979)	Bengkalis	--	Nomor 16 Tahun 1999	4 Oktober 1999
6.	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	PROVINSI RIAU	Tanjung Pinang	Nomor 25 Tahun 2002	25 Oktober 2002
	1 Kabupaten Bintan (PP No. 5 Tahun 2006, sebelumnya bernama Kabupaten Kepulauan Riau)		Bandar Seri Bentan (PP No. 38 Tahun 2004, sebelumnya di Kota Tanjung Pinang)	Nomor 12 Tahun 1956	19 Maret 1956
	2 Kabupaten Karimun	Bintan	Tanjung Balai Karimun	Nomor 53 Tahun 1999	4 Oktober 1999
	3 Kabupaten Natuna		Ranai	Nomor 53 tahun 1999	4 Oktober 1999
	4 Kabupaten Lingga		Daik Lingga	Nomor 31 Tahun 2003	18 Desember 2003
	5 Kabupaten Kepulauan Anambas	Natuna	Siantan	Nomor 33 Tahun 2008	21 Juli 2008
	6 Kota Batam	Bintan	--	Nomor 53 tahun 1999	4 Oktober 1999
	7 Kota Tanjung Pinang ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Tanjung Pinang berdasarkan PP No. 31 Tahun 1983)		--	Nomor 5 Tahun 2001	21 Juni 2001
7.	PROVINSI BENGKULU	PROVINSI SUMATERA SELATAN	Bengkulu	Nomor 9 tahun 1967	12 September 1967
	1 Kabupaten Bengkulu Selatan		Teluk Betung	Nomor 28 Tahun 1959	26 Juni 1959
	2 Kabupaten Bengkulu Utara		Arga Makmur (PP No. 23 Tahun 1976, sebelumnya di Kota Bengkulu)	Nomor 28 Tahun 1959	26 Juni 1959

NO.	NAMA DAERAH OTONOM	DAERAH INDUK	IBUKOTA	UU PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	2	3	4	5	6
3	Kabupaten Rejang Lebong		Curup	Nomor 28 Tahun 1959	26 Juni 1959
4	Kabupaten Kaur	Bengkulu Selatan	Bintuha	Nomor 3 Tahun 2003	25 Februari 2003
5	Kabupaten Seluma		Tais	Nomor 3 Tahun 2003	25 Februari 2003
6	Kabupaten Muko-Muko	Bengkulu Utara	Muko-Muko	Nomor 3 Tahun 2003	25 Februari 2003
7	Kabupaten Kepahiang	Rejang Lebong	Kepahiang	Nomor 38 Tahun 2003	18 Desember 2003
8	Kabupaten Lebong		Tubei	Nomor 39 Tahun 2003	18 Desember 2003
9	Kabupaten Bengkulu Tengah	Bengkulu Utara	Karang Tinggi	Nomor 24 Tahun 2008	21 Juli 2008
10	Kota Bengkulu		--	Nomor 28 Tahun 1959	26 Juni 1959
8.	PROVINSI SUMATERA SELATAN	PROVINSI SUMATERA	Palembang	Nomor 25 Tahun 1959	26 Juni 1959
1	Kabupaten Lahat		Lahat	Nomor 28 Tahun 1959	26 Juni 1959
2	Kabupaten Muara Enim		Muara Enim	Nomor 28 Tahun 1959	26 Juni 1959
3	Kabupaten Musi Banyuasin		Sekayu (SK Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. Des. 52/2/37-34 tanggal 1 April 1963, sebelumnya di Kota Palembang)	Nomor 28 Tahun 1959	26 Juni 1959
4	Kabupaten Musi Rawas		Muara Beliti (PP No. 46 Tahun 2005, sebelumnya di Kota Lubuk Linggau)	Nomor 28 Tahun 1959	26 Juni 1959
5	Kabupaten Ogan Komering Ilir		Kayuagung	Nomor 28 Tahun 1959	26 Juni 1959
6	Kabupaten Ogan Komering Ulu		Baturaja	Nomor 28 Tahun 1959	26 Juni 1959
7	Kabupaten Banyuasin	Musi Banyuasin	Pangkalan Balai	Nomor 6 Tahun 2002	10 April 2002
8	Kabupaten Ogan Ilir	Ogan Komering Ilir	Indralaya	Nomor 37 Tahun 2003	18 Desember 2003
9	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Ogan Komering Ulu	Martapura	Nomor 37 Tahun 2003	18 Desember 2003
10	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan		Muaradua	Nomor 37 Tahun 2003	18 Desember 2003
11	Kabupaten Empat Lawang	Lahat	Tebing Tinggi	Nomor 1 Tahun 2007	2 Januari 2007
12	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Muara Enim	Talang Ubi	Nomor 7 Tahun 2013	11 Januari 2013
13	Kabupaten Musi Rawas Utara	Musi Rawas	Muara Rupit	Nomor 16 Tahun 2013	10 Juli 2013
14	Kota Palembang		--	Nomor 28 Tahun 1959	26 Juni 1959

NO.	NAMA DAERAH OTONOM	DAERAH INDUK	IBUKOTA	UU PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	2	3	4	5	6
	15 Kota Prabumulih ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Prabumulih berdasarkan PP No. 18 Tahun 1982)	Muara Enim	--	Nomor 6 Tahun 2001	21 Juni 2001
	16 Kota Lubuk Linggau ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Lubuk Linggau berdasarkan PP No. 38 Tahun 1981)	Musi Rawas	--	Nomor 7 Tahun 2001	21 Juni 2001
	17 Kota Pagar Alam ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Pagar Alam berdasarkan PP No. 63 Tahun 1991)	Lahat	--	Nomor 8 Tahun 2001	21 Juni 2001
9.	PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	PROVINSI SUMATERA SELATAN	Pangkal Pinang	Nomor 27 Tahun 2000	4 Desember 2000
	1 Kabupaten Bangka		Sungailiat (PP No. 12 Tahun 1971, sebelumnya di Kota Pangkal Pinang)	Nomor 28 Tahun 1959	26 Juni 1959
	2 Kabupaten Belitung		Tanjung Pandan	Nomor 28 Tahun 1959	26 Juni 1959
	3 Kabupaten Bangka Barat	Bangka	Mentok	Nomor 5 Tahun 2003	25 Februari 2003
	4 Kabupaten Bangka Tengah		Koba	Nomor 5 Tahun 2003	25 Februari 2003
	5 Kabupaten Bangka Selatan		Toboali	Nomor 5 Tahun 2003	25 Februari 2003
	6 Kabupaten Belitung Timur	Belitung	Manggar	Nomor 5 Tahun 2003	25 Februari 2003
	7 Kota Pangkal Pinang		--	Nomor 28 Tahun 1959	26 Juni 1959
10.	PROVINSI LAMPUNG	PROVINSI SUMATERA SELATAN	Bandar Lampung (PP No. Tahun, sebelumnya bernama Kota Tanjung Karang-Teluk Betung)	Nomor 14 Tahun 1964	23 September 1964
	1 Kabupaten Lampung Selatan		Teluk Betung	Nomor 28 Tahun 1959	26 Juni 1959
	2 Kabupaten Lampung Tengah		Gunung Sugih (PP No. Tahun, sebelumnya di Kota Metro)	Nomor 28 Tahun 1959	26 Juni 1959
	3 Kabupaten Lampung Utara		Kotabumi	Nomor 28 Tahun 1959	26 Juni 1959
	4 Kabupaten Lampung Barat	Lampung Utara	Lima	Nomor 6 Tahun 1991	16 Agustus 1991
	5 Kabupaten Tanggamus	Lampung Selatan	Kota Agung	Nomor 2 Tahun 1997	3 Januari 1997
	6 Kabupaten Tulang Bawang	Lampung Utara	Menggala	Nomor 2 Tahun 1997	3 Januari 1997

NO.	NAMA DAERAH OTONOM	DAERAH INDUK	IBUKOTA	UU PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	2	3	4	5	6
7	Kabupaten Lampung Timur	Lampung Tengah	Sukadana	Nomor 12 Tahun 1999	20 April 1999
8	Kabupaten Way Kanan	Lampung Utara	Blambangan Umpu	Nomor 12 Tahun 1999	20 April 1999
9	Kabupaten Pesawaran	Lampung Selatan	Gedong Tataan	Nomor 33 Tahun 2007	14 Agustus 2007
10	Kabupaten Pringsewu	Tanggamus	Pringsewu	Nomor 48 Tahun 2008	26 November 2008
11	Kabupaten Mesuji	Tulangbawang	Sidomulyo	Nomor 49 Tahun 2008	26 November 2008
12	Kabupaten Tulangbawang Barat		Panarangan	Nomor 50 Tahun 2008	26 November 2008
13	Kabupaten Pesisir Barat	Lampung Barat	Krui	Nomor 22 Tahun 2012	17 November 2012
14	Kota Bandar Lampung		--	Nomor 28 Tahun 1959	26 Juni 1959
15	Kota Metro ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Metro berdasarkan PP No. 34 Tahun 1986)	Lampung Tengah	--	Nomor 12 Tahun 1999	20 April 1999
<p>Total daerah otonom di Pulau Sumatera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 provinsi - 120 kabupaten - 34 kota 					
11.	PROVINSI DKI JAKARTA		Jakarta	Nomor 1 Tahun 1956	7 Februari 1956
1	Kota Administratif Jakarta Barat ***			PP Nomor 25 Tahun 1978	28 Agustus 1978
2	Kota Administratif Jakarta Pusat ***			PP Nomor 25 Tahun 1978	28 Agustus 1978
3	Kota Administratif Jakarta Utara ***			PP Nomor 25 Tahun 1978	28 Agustus 1978
4	Kota Administratif Jakarta Timur ***			PP Nomor 25 Tahun 1978	28 Agustus 1978
5	Kota Administratif Jakarta Selatan ***			PP Nomor 25 Tahun 1978	28 Agustus 1978
6	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu ***	Jakarta Utara	Pulau Pramuka	PP Nomor 55 Tahun 2001	3 Juli 2001
12.	PROVINSI JAWA BARAT		Bandung	Nomor 11 Tahun 1950	4 Juli 1950
1	Kabupaten Bandung		Soreang (PP No. 2 Tahun 1986, sebelumnya di Kota Bandung)	Nomor 14 Tahun 1950	8 Agustus 1950
2	Kabupaten Bekasi		Cikarang (PP No. 82 Tahun 1998, sebelumnya di Kota Bekasi)	Nomor 14 Tahun 1950	8 Agustus 1950

NO.	NAMA DAERAH OTONOM	DAERAH INDUK	IBUKOTA	UU PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	2	3	4	5	6
3	Kabupaten Bogor		Cibinong (PP No. 6 Tahun 1982, sebelumnya di Kota Bogor)	Nomor 14 Tahun 1950	8 Agustus 1950
4	Kabupaten Ciamis		Ciamis	Nomor 14 Tahun 1950	8 Agustus 1950
5	Kabupaten Cianjur		Cianjur	Nomor 14 Tahun 1950	8 Agustus 1950
6	Kabupaten Cirebon		Sumber (PP No. 33 Tahun 1979, sebelumnya di Kota Cirebon)	Nomor 14 Tahun 1950	8 Agustus 1950
7	Kabupaten Garut		Garut	Nomor 14 Tahun 1950	8 Agustus 1950
8	Kabupaten Indramayu		Indramayu	Nomor 14 Tahun 1950	8 Agustus 1950
9	Kabupaten Karawang		Karawang	Nomor 14 Tahun 1950	8 Agustus 1950
10	Kabupaten Kuningan		Kuningan	Nomor 14 Tahun 1950	8 Agustus 1950
11	Kabupaten Majalengka		Majalengka	Nomor 14 Tahun 1950	8 Agustus 1950
12	Kabupaten Sukabumi		Pelabuhan Ratu (PP No. 35 Tahun 1979, sebelumnya di Kota Sukabumi)	Nomor 14 Tahun 1950	8 Agustus 1950
13	Kabupaten Sumedang		Sumedang	Nomor 14 Tahun 1950	8 Agustus 1950
14	Kabupaten Tasikmalaya		Singaparna (PP No. 30 Tahun 2004, sebelumnya di Kota Tasikmalaya)	Nomor 14 Tahun 1950	8 Agustus 1950
15	Kabupaten Purwakarta	Karawang	Purwakarta	Nomor 4 Tahun 1968	29 Juni 1968
16	Kabupaten Subang	Cianjur	Subang	Nomor 4 Tahun 1968	29 Juni 1968
17	Kabupaten Bandung Barat	Bandung	Ngamprah	Nomor 12 Tahun 2007	2 Januari 2007
18	Kabupaten Pangandaran	Ciamis	Parigi	Nomor 21 Tahun 2012	17 November 2012
19	Kota Bandung		--	Nomor 16 Tahun 1950	14 Agustus 1950
20	Kota Bogor		--	Nomor 16 Tahun 1950	14 Agustus 1950
21	Kota Cirebon		--	Nomor 16 Tahun 1950	14 Agustus 1950
22	Kota Sukabumi		--	Nomor 17 Tahun 1950	14 Agustus 1950

NO.	NAMA DAERAH OTONOM	DAERAH INDUK	IBUKOTA	UU PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	2	3	4	5	6
	23 Kota Bekasi ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Bekasi berdasarkan PP No. 48 Tahun 1981)	Bekasi	--	Nomor 9 Tahun 1996	16 Desember 1996
	24 Kota Depok ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Depok berdasarkan PP No. 43 Tahun 1981)	Bogor	--	Nomor 15 Tahun 1999	20 April 1999
	25 Kota Cimahi ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Cimahi berdasarkan PP No. 29 Tahun 1975)	Bandung	--	Nomor 9 Tahun 2001	21 Juni 2001
	26 Kota Tasikmalaya ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Tasikmalaya berdasarkan PP No. 22 Tahun 1976)	Tasikmalaya	--	Nomor 10 Tahun 2001	21 Juni 2001
	27 Kota Banjar ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Banjar berdasarkan PP No. 54 Tahun 1991)	Ciamis	--	Nomor 27 Tahun 2002	25 Oktober 2002
13.	PROVINSI BANTEN	PROVINSI JAWA BARAT	Serang	Nomor 23 Tahun 2000	17 Okt 2000
	1 Kabupaten Lebak		Rangkasbitung	Nomor 14 Tahun 1950	8 Agustus 1950
	2 Kabupaten Pandeglang		Pandeglang	Nomor 14 Tahun 1950	8 Agustus 1950
	3 Kabupaten Serang		Serang	Nomor 14 Tahun 1950	8 Agustus 1950
	4 Kabupaten Tangerang		Tigaraksa (PP No. 14 Tahun 1995, sebelumnya di Kota Tangerang)	Nomor 14 Tahun 1950	8 Agustus 1950
	5 Kota Tangerang ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Tangerang berdasarkan PP No. 50 Tahun 1981)	Tangerang	--	Nomor 2 Tahun 1993	27 Februari 1993
	6 Kota Cilegon ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Cilegon berdasarkan PP No. 40 Tahun 1983)	Serang	--	Nomor 15 Tahun 1999	20 April 1999
	7 Kota Serang	Serang	--	Nomor 32 Tahun 2007	14 Agustus 2007
	8 Kota Tangerang Selatan	Tangerang	--	Nomor 51 Tahun 2008	26 November 2008
14.	PROVINSI JAWA TENGAH		Semarang	Nomor 10 Tahun 1950	4 Juli 1950
	1 Kabupaten Banjarnegara		Banjarnegara	Nomor 13 Tahun 1950	8 Agustus 1950
	2 Kabupaten Banyumas		Purwokerto	Nomor 13 Tahun 1950	8 Agustus 1950

NO.	NAMA DAERAH OTONOM	DAERAH INDUK	IBUKOTA	UU PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	2	3	4	5	6
3	Kabupaten Blora		Blora	Nomor 13 Tahun 1950	8 Agustus 1950
4	Kabupaten Boyolali		Boyolali	Nomor 13 Tahun 1950	8 Agustus 1950
5	Kabupaten Brebes		Brebes	Nomor 13 Tahun 1950	8 Agustus 1950
6	Kabupaten Cilacap		Cilacap	Nomor 13 Tahun 1950	8 Agustus 1950
7	Kabupaten Demak		Demak	Nomor 13 Tahun 1950	8 Agustus 1950
8	Kabupaten Grobogan		Purwodadi	Nomor 13 Tahun 1950	8 Agustus 1950
9	Kabupaten Jepara		Jepara	Nomor 13 Tahun 1950	8 Agustus 1950
10	Kabupaten Karanganyar		Karanganyar	Nomor 13 Tahun 1950	8 Agustus 1950
11	Kabupaten Kebumen		Kebumen	Nomor 13 Tahun 1950	8 Agustus 1950
12	Kabupaten Kendal		Kendal	Nomor 13 Tahun 1950	8 Agustus 1950
13	Kabupaten Klaten		Klaten	Nomor 13 Tahun 1950	8 Agustus 1950
14	Kabupaten Kudus		Kudus	Nomor 13 Tahun 1950	8 Agustus 1950
15	Kabupaten Magelang		Mungkid (PP No. 21 Tahun 1982, sebelumnya di Kota Magelang)	Nomor 13 Tahun 1950	8 Agustus 1950
16	Kabupaten Pati		Pati	Nomor 13 Tahun 1950	8 Agustus 1950
17	Kabupaten Pekalongan		Kajen (PP No. 48 Tahun 1986, sebelumnya di Kota Pekalongan)	Nomor 13 Tahun 1950	8 Agustus 1950
18	Kabupaten Pemasang		Pemasang	Nomor 13 Tahun 1950	8 Agustus 1950
19	Kabupaten Purbalingga		Purbalingga	Nomor 13 Tahun 1950	8 Agustus 1950
20	Kabupaten Purworejo		Purworejo	Nomor 13 Tahun 1950	8 Agustus 1950
21	Kabupaten Rembang		Rembang	Nomor 13 Tahun 1950	8 Agustus 1950
22	Kabupaten Semarang		Ungaran (PP No. 29 Tahun 1983, sebelumnya di Kota Semarang)	Nomor 13 Tahun 1950	8 Agustus 1950
23	Kabupaten Sragen		Sragen	Nomor 13 Tahun 1950	8 Agustus 1950
24	Kabupaten Sukoharjo		Sukoharjo	Nomor 13 Tahun 1950	8 Agustus 1950

NO.	NAMA DAERAH OTONOM	DAERAH INDUK	IBUKOTA	UU PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	2	3	4	5	6
	25 Kabupaten Tegal		Slawi (PP No. 2 Tahun 1984, sebelumnya di Kota Tegal)	Nomor 13 Tahun 1950	8 Agustus 1950
	26 Kabupaten Temanggung		Temanggung	Nomor 13 Tahun 1950	8 Agustus 1950
	27 Kabupaten Wonogiri		Wonogiri	Nomor 13 Tahun 1950	8 Agustus 1950
	28 Kabupaten Wonosobo		Wonosobo	Nomor 13 Tahun 1950	8 Agustus 1950
	29 Kabupaten Batang	Pekalongan	Batang	Nomor 9 Tahun 1965	14 Juni 1965
	30 Kota Surakarta		--	Nomor 16 Tahun 1950	14 Agustus 1950
	31 Kota Semarang		--	Nomor 16 Tahun 1950	14 Agustus 1950
	32 Kota Pekalongan		--	Nomor 16 Tahun 1950	14 Agustus 1950
	33 Kota Magelang		--	Nomor 17 Tahun 1950	14 Agustus 1950
	34 Kota Salatiga		--	Nomor 17 Tahun 1950	14 Agustus 1950
	35 Kota Tegal		--	Nomor 13 Tahun 1954	12 Agustus 1950
15.	PROVINSI DI YOGYAKARTA		Yogyakarta	Nomor 3 Tahun 1950	3 Maret 1950
	1 Kabupaten Bantul		Bantul	Nomor 15 Tahun 1950	8 Agustus 1950
	2 Kabupaten Gunung Kidul		Wonosari	Nomor 15 Tahun 1950	8 Agustus 1950
	3 Kabupaten Sleman		Sleman	Nomor 15 Tahun 1950	8 Agustus 1950
	4 Kabupaten Kulon Progo (Sebelumnya merupakan 2 kabupaten yang terpisah, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarto yang masing-masing dibentuk berdasarkan UU No. 15 Tahun 1950)		Sentolo	Nomor 18 Tahun 1951	12 Oktober 1951
	5 Kota Yogyakarta		--	Nomor 16 Tahun 1950	14 Agustus 1950
16.	PROVINSI JAWA TIMUR		Surabaya	Nomor 2 Tahun 1950	3 Maret 1950
	1 Kabupaten Bangkalan		Bangkalan	Nomor 12 Tahun 1950	8 Agustus 1950
	2 Kabupaten Banyuwangi		Banyuwangi	Nomor 12 Tahun 1950	8 Agustus 1950
	3 Kabupaten Blitar		Kanigoro (PP No. 3 Tahun 2010, sebelumnya di Kota Blitar)	Nomor 12 Tahun 1950	8 Agustus 1950
	4 Kabupaten Bojonegoro		Bojonegoro	Nomor 12 Tahun 1950	8 Agustus 1950
	5 Kabupaten Bondowoso		Bondowoso	Nomor 12 Tahun 1950	8 Agustus 1950

NO.	NAMA DAERAH OTONOM	DAERAH INDUK	IBUKOTA	UU PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	2	3	4	5	6
6	Kabupaten Gresik (PP No. 38 Tahun 1974, sebelumnya bernama Kabupaten Surabaya)		Gresik	Nomor 12 Tahun 1950	8 Agustus 1950
7	Kabupaten Jember		Jember	Nomor 12 Tahun 1950	8 Agustus 1950
8	Kabupaten Jombang		Jombang	Nomor 12 Tahun 1950	8 Agustus 1950
9	Kabupaten Kediri		Kediri	Nomor 12 Tahun 1950	8 Agustus 1950
10	Kabupaten Lamongan		Lamongan	Nomor 12 Tahun 1950	8 Agustus 1950
11	Kabupaten Lumajang		Lumajang	Nomor 12 Tahun 1950	8 Agustus 1950
12	Kabupaten Madiun		Caruban (PP No. 52 Tahun 2010, sebelumnya di Kota Madiun)	Nomor 12 Tahun 1950	8 Agustus 1950
13	Kabupaten Magetan		Magetan	Nomor 12 Tahun 1950	8 Agustus 1950
14	Kabupaten Malang		Kepanjen (PP No. 18 Tahun 2008, sebelumnya di Kota Malang)	Nomor 12 Tahun 1950	8 Agustus 1950
15	Kabupaten Mojokerto		Mojokerto	Nomor 12 Tahun 1950	8 Agustus 1950
16	Kabupaten Nganjuk		Nganjuk	Nomor 12 Tahun 1950	8 Agustus 1950
17	Kabupaten Ngawi		Ngawi	Nomor 12 Tahun 1950	8 Agustus 1950
18	Kabupaten Pacitan		Pacitan	Nomor 12 Tahun 1950	8 Agustus 1950
19	Kabupaten Pamekasan		Pamekasan	Nomor 12 Tahun 1950	8 Agustus 1950
20	Kabupaten Pasuruan		Pasuruan	Nomor 12 Tahun 1950	8 Agustus 1950
21	Kabupaten Ponorogo		Ponorogo	Nomor 12 Tahun 1950	8 Agustus 1950
22	Kabupaten Probolinggo		Kraksaan (PP No. 2 Tahun 2010, sebelumnya di Kota Probolinggo)	Nomor 12 Tahun 1950	8 Agustus 1950
23	Kabupaten Sampang		Sampang	Nomor 12 Tahun 1950	8 Agustus 1950
24	Kabupaten Sidoarjo		Sidoarjo	Nomor 12 Tahun 1950	8 Agustus 1950
25	Kabupaten Situbondo (PP No. 28 Tahun 1972, sebelumnya bernama Kabupaten Panarukan)		Situbondo		

NO.	NAMA DAERAH OTONOM	DAERAH INDUK	IBUKOTA	UU PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	2	3	4	5	6
	26 Kabupaten Sumenep		Sumenep	Nomor 12 Tahun 1950	8 Agustus 1950
	27 Kabupaten Trenggalek		Trenggalek	Nomor 12 Tahun 1950	8 Agustus 1950
	28 Kabupaten Tuban		Tuban	Nomor 12 Tahun 1950	8 Agustus 1950
	29 Kabupaten Tulungagung		Tulungagung	Nomor 12 Tahun 1950	8 Agustus 1950
	30 Kota Kediri		--	Nomor 16 Tahun 1950	14 Agustus 1950
	31 Kota Madiun		--	Nomor 16 Tahun 1950	14 Agustus 1950
	32 Kota Malang		--	Nomor 16 Tahun 1950	14 Agustus 1950
	33 Kota Surabaya		--	Nomor 16 Tahun 1950	14 Agustus 1950
	34 Kota Mojokerto		--	Nomor 17 Tahun 1950	14 Agustus 1950
	35 Kota Pasuruan		--	Nomor 17 Tahun 1950	14 Agustus 1950
	36 Kota Probolinggo		--	Nomor 17 Tahun 1950	14 Agustus 1950
	37 Kota Blitar		--	Nomor 17 Tahun 1950	14 Agustus 1950
	38 Kota Batu ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Batu berdasarkan PP No. 12 Tahun 1993)	Malang	--	Nomor 11 Tahun 2001	21 Juni 2001
	Total daerah otonom di Pulau Jawa: - 6 provinsi - 83 kabupaten - 29 kota				
17.	PROVINSI BALI	PROVINSI NUSA TENGGARA (UU No. 8 Tahun 1958, sebelumnya bernama Provinsi Sunda Kecil)	Denpasar (Kep. Mendagri & Otda No. Des 52/2/36-136, sebelumnya di Singaraja)	Nomor 64 Tahun 1958	11 Agustus 1958
	1. Kabupaten Badung		Mengwi (PP No. 67 Tahun 2009, sebelumnya di Kota Denpasar)	Nomor 69 Tahun 1958	9 Agustus 1958
	2. Kabupaten Bangli		Bangli	Nomor 69 Tahun 1958	9 Agustus 1958
	3. Kabupaten Buleleng		Singaraja	Nomor 69 Tahun 1958	9 Agustus 1958
	4. Kabupaten Gianyar		Gianyar	Nomor 69 Tahun 1958	9 Agustus 1958
	5. Kabupaten Jembrana		Negara	Nomor 69 Tahun 1958	9 Agustus 1958

NO.	NAMA DAERAH OTONOM	DAERAH INDUK	IBUKOTA	UU PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	2	3	4	5	6
	6. Kabupaten Karangasem		Amlapura (Kep. Mendagri No. 284 Tahun 1970, sebelumnya bernama Karangasem)	Nomor 69 Tahun 1958	9 Agustus 1958
	7. Kabupaten Klungkung		Klungkung	Nomor 69 Tahun 1958	9 Agustus 1958
	8. Kabupaten Tabanan		Tabanan	Nomor 69 Tahun 1958	9 Agustus 1958
	9. Kota Denpasar ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Denpasar berdasarkan PP No. 20 Tahun 1978)	Badung	--	Nomor 1 Tahun 1992	15 Januari 1992
18.	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	PROVINSI NUSA TENGGARA (UU No. 8 Tahun 1958, sebelumnya bernama Provinsi Sunda Kecil)	Mataram	Nomor 64 Tahun 1958	11 Agustus 1958
	1. Kabupaten Bima		Woha (PP No. 31 Tahun 2008, sebelumnya di Kota Bima)	Nomor 69 Tahun 1958	9 Agustus 1958
	2. Kabupaten Dompu		Dompu	Nomor 69 Tahun 1958	9 Agustus 1958
	3. Kabupaten Lombok Barat		Gerung (PP No. 62 Tahun 2000, sebelumnya di Kota Mataram)	Nomor 69 Tahun 1958	9 Agustus 1958
	4. Kabupaten Lombok Tengah		Praya	Nomor 69 Tahun 1958	9 Agustus 1958
	5. Kabupaten Lombok Timur		Selong	Nomor 69 Tahun 1958	9 Agustus 1958
	6. Kabupaten Sumbawa		Sumbawa Besar	Nomor 69 Tahun 1958	9 Agustus 1958
	7. Kabupaten Sumbawa Barat	Sumbawa	Taliwang	Nomor 30 Tahun 2003	18 Desember 2003
	8. Kabupaten Lombok Utara	Lombok Barat	Tanjung	Nomor 26 Tahun 2008	21 Juli 2008
	9. Kota Mataram ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Mataram berdasarkan PP No. 21 Tahun 1978)	Lombok Barat	--	Nomor 1 Tahun 1992	15 Januari 1992
	10. Kota Bima ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Bima berdasarkan PP No. 77 Tahun 1998)	Bima	--	Nomor 13 tahun 2002	10 April 2002

NO.	NAMA DAERAH OTONOM	DAERAH INDUK	IBUKOTA	UU PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	2	3	4	5	6
19.	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	PROVINSI NUSA TENGGARA (UU No. 8 Tahun 1958, sebelumnya bernama Provinsi Sunda Kecil)	Kupang	Nomor 64 Tahun 1958	11 Agustus 1958
	1. Kabupaten Alor		Kalabahi	Nomor 69 Tahun 1958	9 Agustus 1958
	2. Kabupaten Belu		Atambua	Nomor 69 Tahun 1958	9 Agustus 1958
	3. Kabupaten Ende		Ende	Nomor 69 Tahun 1958	9 Agustus 1958
	4. Kabupaten Flores Timur		Larantuka	Nomor 69 Tahun 1958	9 Agustus 1958
	5. Kabupaten Kupang		Oelamasi (PP No. 3. Tahun 2006, sebelumnya di Kota Kupang)	Nomor 69 Tahun 1958	9 Agustus 1958
	6. Kabupaten Manggarai		Ruteng	Nomor 69 Tahun 1958	9 Agustus 1958
	7. Kabupaten Ngada		Bajawa	Nomor 69 Tahun 1958	9 Agustus 1958
	8. Kabupaten Sikka		Maumere	Nomor 69 Tahun 1958	9 Agustus 1958
	9. Kabupaten Sumba Barat		Waikabubak	Nomor 69 Tahun 1958	9 Agustus 1958
	10. Kabupaten Sumba Timur		Waingapu	Nomor 69 Tahun 1958	9 Agustus 1958
	11. Kabupaten Timor Tengah Selatan		So'e	Nomor 69 Tahun 1958	9 Agustus 1958
	12. Kabupaten Timor Tengah Utara		Kafemanu	Nomor 69 Tahun 1958	9 Agustus 1958
	13. Kabupaten Lembata	Flores Timur	Lewoleba	Nomor 52 tahun 1999	4 Oktober 1999
	14. Kabupaten Rote Ndao	Kupang	Ba'a	Nomor 9 Tahun 2002	10 April 2002
	15. Kabupaten Manggarai Barat	Manggarai	Labuan Bajo	Nomor 8 Tahun 2003	25 Februari 2003
	16. Kabupaten Manggarai Timur		Borong	Nomor 36 Tahun 2007	14 Agustus 2007
	17. Kabupaten Nagekeo	Ngada	Mbay	Nomor 2 Tahun 2007	2 Januari 2007
	18. Kabupaten Sumba Barat Daya	Sumba Barat	Tambolaka	Nomor 16 Tahun 2007	2 Januari 2007
	19. Kabupaten Sumba Tengah		Waibakul	Nomor 3 Tahun 2007	2 Januari 2007
	20. Kabupaten Sabu Raijua	Kupang	Mania	Nomor 52 Tahun 2008	26 Nov 2008
	21. Kabupaten Malaka	Belu	Betun	Nomor 3 Tahun 2013	11 Januari 2013
	22. Kota Kupang ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Kupang berdasarkan PP No. 22 Tahun 1978)	Kupang	--	Nomor 5 Tahun 1996	11 April 1996

NO.	NAMA DAERAH OTONOM	DAERAH INDUK	IBUKOTA	UU PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	2	3	4	5	6
	Total daerah otonom di Kepulauan Nusa Tenggara: - 3 provinsi - 37 kabupaten - 4 kota				
20.	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	PROVINSI KALIMANTAN	Pontianak	Nomor 25 Tahun 1956	29 November 1956
1	Kabupaten Kapuas Hulu		Putusibau	Nomor 27 Tahun 1959	26 Juni 1959
2	Kabupaten Ketapang		Ketapang	Nomor 27 Tahun 1959	26 Juni 1959
3	Kabupaten Pontianak		Mempawah (SK Menteri Pemerintahan Umum & Otonomi Daerah No. Des. 52/1/9-11, sebelumnya di Kota Pontianak)		
4	Kabupaten Sambas		Singkawang (SK Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. Des 52/2/36-33)	Nomor 27 Tahun 1959	26 Juni 1959
5	Kabupaten Sanggau		Sanggau	Nomor 27 Tahun 1959	26 Juni 1959
6	Kabupaten Sintang		Sintang	Nomor 27 Tahun 1959	26 Juni 1959
7	Kabupaten Bengkayang	Sambas	Bengkayang	Nomor 10 Tahun 1999	20 April 1999
8	Kabupaten Landak	Pontianak	Ngabang	Nomor 55 Tahun 1999	4 Oktober 1999
9	Kabupaten Melawi	Sintang	Nanga Pinoh	Nomor 34 Tahun 2003	18 Desember 2003
10	Kabupaten Sekadau	Sanggau	Sekadau	Nomor 34 Tahun 2003	18 Desember 2003
11	Kabupaten Kayong Utara	Ketapang	Sukadana	Nomor 6 Tahun 2007	2 Januari 2007
12	Kabupaten Kubu Raya	Pontianak	Sungai Raya	Nomor 35 Tahun 2007	14 Agustus 2007
13	Kota Pontianak		--	Nomor 27 Tahun 1959	26 Juni 1959
14	Kota Singkawang ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Singkawang berdasarkan PP No. 49 Tahun 1981)	Bengkayang	--	Nomor 12 Tahun 2001	21 Juni 2001
21.	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Palangkaraya (Keputusan Mendagri dan Otda No. Des. 52/1/2-206, sebelumnya di Banjarmasin)	Nomor 21 Tahun 1958	17 Juni 1958

NO.	NAMA DAERAH OTONOM	DAERAH INDUK	IBUKOTA	UU PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	2	3	4	5	6
1	Kabupaten Barito Selatan		Buntok	Nomor 27 Tahun 1959	26 Juni 1959
2	Kabupaten Barito Utara		Muara Teweh	Nomor 27 Tahun 1959	26 Juni 1959
3	Kabupaten Kapuas		Kuala Kapuas	Nomor 27 Tahun 1959	26 Juni 1959
4	Kabupaten Kotawaringin Barat		Pangkalan Bun	Nomor 27 Tahun 1959	26 Juni 1959
5	Kabupaten Kotawaringin Timur		Sampit	Nomor 27 Tahun 1959	26 Juni 1959
6	Kabupaten Barito Timur	Barito Selatan	Tamiang Layang	Nomor 5 Tahun 2002	10 April 2002
7	Kabupaten Gunung Mas	Kapuas	Kuala Kurun	Nomor 5 Tahun 2002	10 April 2002
8	Kabupaten Katingan	Kotawaringin Timur	Kasongan	Nomor 5 Tahun 2002	10 April 2002
9	Kabupaten Lamandau	Kotawaringin Barat	Nanga Bulik	Nomor 5 Tahun 2002	10 April 2002
10	Kabupaten Murung Raya	Barito Utara	Puruk Cahu	Nomor 5 Tahun 2002	10 April 2002
11	Kabupaten Pulang Pisau	Kapuas	Pulang Pisau	Nomor 5 Tahun 2002	10 April 2002
12	Kabupaten Sukamara	Kotawaringin Barat	Sukamara	Nomor 5 Tahun 2002	10 April 2002
13	Kabupaten Seruyan	Kotawaringin Timur	Kuala Pembuang	Nomor 5 Tahun 2002	10 April 2002
14	Kota Palangkaraya	Kapuas	--	Nomor 5 Tahun 1965	14 Juni 1965
22.	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	PROVINSI KALIMANTAN	Banjarmasin	Nomor 25 Tahun 1956	29 November 1956
1	Kabupaten Banjar Baru (UU No. 8 Tahun 1965, sebelumnya bernama Kabupaten Banjar)		Martapura	Nomor 27 Tahun 1959	26 Juni 1959
2	Kabupaten Barito Kuala		Marabahan	Nomor 27 Tahun 1959	26 Juni 1959
3	Kabupaten Hulu Sungai Selatan		Kandangan	Nomor 27 Tahun 1959	26 Juni 1959
4	Kabupaten Hulu Sungai Tengah		Barabai	Nomor 27 Tahun 1959	26 Juni 1959
5	Kabupaten Hulu Sungai Utara		Amuntai	Nomor 27 Tahun 1959	26 Juni 1959
6	Kabupaten Kotabaru		Kotabaru	Nomor 27 Tahun 1959	26 Juni 1959
7	Kabupaten Tanah Laut	Banjar Baru	Pleihari	Nomor 8 Tahun 1965	14 Juli 1965
8	Kabupaten Tabalong	Hulu Sungai Utara	Tanjung	Nomor 8 Tahun 1965	14 Juli 1965
9	Kabupaten Tapin	Hulu Sungai Selatan	Rantau	Nomor 8 Tahun 1965	14 Juli 1965
10	Kabupaten Tanah Bumbu	Kotabaru	Batulicin	Nomor 2 Tahun 2003	25 Februari 2003
11	Kabupaten Balangan	Hulu Sungai Utara	Paringin	Nomor 2 Tahun 2003	25 Februari 2003

NO.	NAMA DAERAH OTONOM	DAERAH INDUK	IBUKOTA	UU PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	2	3	4	5	6
	12 Kota Banjarmasin		--	Nomor 27 Tahun 1959	26 Juni 1959
	13 Kota Banjarbaru ** (sebelumnya adalah Kota Administratif Banjarbaru berdasarkan PP No. 26 Tahun 1975)	Banjar Baru	--	Nomor 9 Tahun 1999	10 April 1999
23.	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	PROVINSI KALIMANTAN	Samarinda	Nomor 25 Tahun 1956	29 November 1956
	1 Kabupaten Berau		Tanjung Redep	Nomor 27 Tahun 1959	26 Juni 1959
	2 Kabupaten Kutai Kartanegara (PP No. 8 Tahun 2002, sebelumnya bernama Kabupaten Kutai)		Tenggarong (Keputusan Mendagri No. Des. 52/6/44, sebelumnya di Kota Samarinda)	Nomor 27 Tahun 1959	26 Juni 1959
	3 Kabupaten Paser (PP No. 49 Tahun 2007, sebelumnya bernama Kabupaten Pasir)		Tanah Grogot	Nomor 27 Tahun 1959	26 Juni 1959
	4 Kabupaten Kutai Barat	Kutai	Sendawar	Nomor 47 Tahun 1999	
	5 Kabupaten Kutai Timur		Sanggata	Nomor 47 Tahun 1999	
	6 Kabupaten Penajam Paser Utara	Paser	Penajam	Nomor 7 Tahun 2002	10 April 2002
	7 Kabupaten Mahakam Ulu	Kutai Barat	Long Bagun	Nomor 2 Tahun 2013	11 Januari 2013
	8 Kota Balikpapan		--	Nomor 27 Tahun 1959	26 Juni 1959
	9 Kota Samarinda		--	Nomor 27 Tahun 1959	26 Juni 1959
	10 Kota Bontang ** (Sebelumnya adalah Kota Bontang berdasarkan PP No. 20 Tahun 1989)	Kutai	--	Nomor 47 Tahun 1999	
24.	PROVINSI KALIMANTAN UTARA	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Tanjung Selor	Nomor 20 Tahun 2012	17 November 2012
	1 Kabupaten Bulungan		Tanjung Selor	Nomor 27 Tahun 1959	26 Juni 1959
	2 Kabupaten Malinau	Bulungan	Malinau	Nomor 47 Tahun 1999	
	3 Kabupaten Nunukan		Nunukan	Nomor 47 Tahun 1999	
	4 Kabupaten Tana Tidung		Tideng Pale	Nomor 34 Tahun 2007	14 Agustus 2007
	5 Kota Tarakan ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Tarakan berdasarkan PP No. 47 Tahun 1981)		--	Nomor 29 Tahun 1997	8 Oktober 1997

NO.	NAMA DAERAH OTONOM	DAERAH INDUK	IBUKOTA	UU PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	2	3	4	5	6
	Total daerah otonom di Pulau Kalimantan: - 5 provinsi - 47 kabupaten - 9 kota				
25.	PROVINSI SULAWESI UTARA	PROVINSI SULAWESI UTARA-TENGAH	Manado	Nomor 13 Tahun 1964	23 September 1964
	1. Kabupaten Bolaang Mongondow		Lolak (PP No. 9 Tahun 2010, sebelumnya di Kota Kotamobagu)	Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
	2. Kabupaten Kepulauan Sangihe		Tahuna	Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
	3. Kabupaten Minahasa		Tondano	Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
	4. Kabupaten Kepulauan Talaud	Sangihe	Melonguane	Nomor 8 Tahun 2002	10 April 2002
	5. Kabupaten Minahasa Selatan	Minahasa	Amurang	Nomor 10 Tahun 2003	25 Februari 2003
	6. Kabupaten Minahasa Utara		Airmadidi	Nomor 33 Tahun 2003	18 Desember 2003
	7. Kabupaten Minahasa Tenggara	Minahasa Selatan	Ratahan	Nomor 9 Tahun 2007	2 Januari 2007
	8. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Sangihe	Ondong Siau	Nomor 15 Tahun 2007	2 Januari 2007
	9. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Bolaang Mongondow	Boroko	Nomor 10 Tahun 2007	2 Januari 2007
	10. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur		Tutuyan	Nomor 29 Tahun 2008	21 Juli 2008
	11. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan		Bolang Uki	Nomor 30 Tahun 2008	21 Juli 2008
	12. Kota Manado		--	Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
	13. Kota Bitung ** (sebelumnya adalah Kota Administratif Bitung berdasarkan PP No. 4 Tahun 1975)	Minahasa	--	Nomor 7 Tahun 1990	15 Agustus 1950
	14. Kota Tomohon		--	Nomor 10 Tahun 2003	25 Februari 2003
	15. Kota Kotamobagu	Bolaang Mongodow	--	Nomor 4 Tahun 2007	2 Januari 2007
26.	PROVINSI GORONTALO	PROVINSI SULAWESI UTARA	Gorontalo	Nomor 38 Tahun 2000	22 Des 2000
	1. Kabupaten Gorontalo		Limboto (PP No. 30 Tahun 1979, sebelumnya di Isimu)	Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
	2. Kabupaten Boalemo	Gorontalo	Tilamuta	Nomor 50 Nomor 1999	
	3. Kabupaten Bone Bolango		Suwawa	Nomor 6 Tahun 2003	25 Februari 2003

NO.	NAMA DAERAH OTONOM	DAERAH INDUK	IBUKOTA	UU PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	2	3	4	5	6
	4. Kabupaten Pohuwato	Boalemo	Marisa	Nomor 6 Tahun 2003	25 Februari 2003
	5. Kabupaten Gorontalo Utara	Gorontalo	Kwandang	Nomor 11 Tahun 2007	2 Januari 2007
	6. Kota Gorontalo		--	Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
27.	PROVINSI SULAWESI TENGAH	PROVINSI SULAWESI UTARA-TENGAH	Palu	Nomor 13 Tahun 1964	23 September 1964
	1. Kabupaten Banggai		Luwuk	Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
	2. Kabupaten Donggala		Benawa (PP No. 71 Tahun 1999, sebelumnya di Kota Palu)	Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
	3. Kabupaten Poso		Poso	Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
	4. Kabupaten Toli-Toli (UU No. 51 Tahun 1999, sebelumnya bernama Kabupaten Buol Toli-Toli)		Toil-Toli	Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
	5. Kabupaten Banggai Kepulauan	Banggai	Salakan	Nomor 51 Tahun 1999	
	6. Kabupaten Buol	Buol Toli-Toli	Buol	Nomor 51 Tahun 1999	
	7. Kabupaten Morowali	Poso	Bungku	Nomor 54 Tahun 1999	
	8. Kabupaten Parigi Moutong	Donggala	Parigi	Nomor 10 Tahun 2002	10 April 2002
	9. Kabupaten Tojo Una-Una	Poso	Ampana	Nomor 32 Tahun 2003	18 Desember 2003
	10. Kabupaten Sigi	Donggala	Sigi Biromaru	Nomor 27 Tahun 2008	21 Juli 2008
	11. Kabupaten Banggai Laut	Banggai Kepulauan	Banggai	Nomor 6 Tahun 2013	11 Januari 2013
	12. Kabupaten Morowali Utara	Morowali	Kolonodale	Nomor 12 Tahun 2013	15 Mei 2013
	13. Kota Palu ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Palu berdasarkan PP No. 18 Tahun 1978)	Donggala	--	Nomor 4 Tahun 1994	22 Juli 1994
28.	PROVINSI SULAWESI SELATAN	PROVINSI SULAWESI SELATAN-TENGGARA	Makassar (PP No. 86 Tahun 1999, sebelumnya bernama Kota Ujung Pandang)	Nomor 13 Tahun 1964	23 September 1964
	1. Kabupaten Bantaeng		Bantaeng	Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
	2. Kabupaten Barru		Barru	Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
	3. Kabupaten Bone		Watampone	Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
	4. Kabupaten Bulukumba		Bulukumba	Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959

NO.	NAMA DAERAH OTONOM	DAERAH INDUK	IBUKOTA	UU PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	2	3	4	5	6
	5. Kabupaten Enrekang		Enrekang	Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
	6. Kabupaten Gowa		Sunggomimasa	Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
	7. Kabupaten Jeneponto		Jeneponto	Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
	8. Kabupaten Luwu		Belopa	Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
	9. Kabupaten Maros		Maros	Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
	10. Kabupaten Pangkajene Kepulauan		Pangkajene	Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
	11. Kabupaten Pinrang		Pinrang	Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
	12. Kabupaten Kepulauan Selayar (PP No. 59 Tahun 2008, sebelumnya bernama Kabupaten Selayar)		Benteng	Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
	13. Kabupaten Sinjai		Sinjai	Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
	14. Kabupaten Sidenreng Rappang		Pangkajene	Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
	15. Kabupaten Soppeng		Watansoppeng	Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
	16. Kabupaten Takalar		Takalar	Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
	17. Kabupaten Tana Toraja		Makale	Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
	18. Kabupaten Wajo		Sengkang	Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
	19. Kabupaten Luwu Utara	Luwu	Masamba	Nomor 13 Tahun 1999	20 April 1999
	20. Kabupaten Luwu Timur	Luwu Utara	Malili	Nomor 7 Tahun 2003	25 Februari 2003
	21. Kabupaten Toraja Utara	Tana Toraja	Rantepao	Nomor 28 Tahun 2008	21 Juli 2008
	22. Kota Makassar		--	Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
	23. Kota Pare-Pare		--	Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
	24. Kota Palopo ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Palopo berdasarkan PP No. 42 Tahun 1986)	Luwu	--	Nomor 11 Tahun 2002	10 April 2002
29.	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	PROVINSI SULAWESI SELATAN-TENGGARA	Kendari	Nomor 13 Tahun 1964	23 September 1964
	1. Kabupaten Bombana	Buton	Rumbia	Nomor 29 Tahun 2003	18 Desember 2003
	2. Kabupaten Buton		Pasar Wajo (PP No. 29 Tahun 2003, sebelumnya di Kota Bau-Bau)	Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
	3. Kabupaten Kolaka		Kolaka	Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959

NO.	NAMA DAERAH OTONOM	DAERAH INDUK	IBUKOTA	UU PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	2	3	4	5	6
	4. Kabupaten Konawe (PP No. 26 Tahun 2004, sebelumnya bernama Kabupaten Kendari)		Una Aha (PP No. 29 Tahun 1982, sebelumnya di Kota Kendari)	Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
	5. Kabupaten Muna		Raha	Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
	6. Kabupaten Wakatobi	Buton	Wangi-Wangi	Nomor 29 Tahun 2003	18 Desember 2003
	7. Kabupaten Kolaka Utara	Kolaka	Lasusua	Nomor 29 Tahun 2003	18 Desember 2003
	8. Kabupaten Konawe Selatan	Konawe	Andolo	Nomor 4 Tahun 2003	25 Februari 2003
	9. Kabupaten Konawe Utara		Wanggudu	Nomor 13 Tahun 2007	2 Januari 2007
	10. Kabupaten Buton Utara	Muna	Buranga	Nomor 14 Tahun 2007	2 Januari 2007
	11. Kabupaten Kolaka Timur	Kolaka	Tirawuta	Nomor 7 Tahun 2013	11 Januari 2013
	12. Kabupaten Konawe Kepulauan	Konawe	Langara	Nomor 13 Tahun 2013	15 Mei 2013
	13. Kabupaten Muna Barat	Muna	Laworo	Nomor 14 Tahun 2014	23 Juli 2014
	14. Kabupaten Buton Tengah	Buton	Labungkari	Nomor 15 Tahun 2014	23 Juli 2014
	15. Kabupaten Buton Selatan		Batauga	Nomor 16 Tahun 2014	23 Juli 2014
	16. Kota Kendari ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Kendari berdasarkan PP No. 19 Tahun 1978)	Konawe	--	Nomor 6 Tahun 1995	3 Agustus 1995
	17. Kota Bau-Bau ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Bau-Bau berdasarkan PP No. 40 Tahun 1981)	Buton	--	Nomor 13 Tahun 2001	21 Juni 2001
30.	PROVINSI SULAWESI BARAT	PROVINSI SULAWESI SELATAN	Mamuju	Nomor 11 Tahun 2002	10 April 2002
	1. Kabupaten Majene		Majene	Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
	2. Kabupaten Mamuju		Mamuju	Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
	3. Kabupaten Polewali Mandar (PP No. 74 Tahun 2005, sebelumnya bernama Kabupaten Polewali Mamasa)		Polewali	Nomor 29 Tahun 1959	4 Juli 1959
	4. Kabupaten Mamasa	Polewali Mamasa	Mamasa	Nomor 11 Tahun 2002	10 April 2002
	5. Kabupaten Mamuju Utara	Mamuju	Pasangayu	Nomor 5 Tahun 2003	25 April 2003
	6. Kabupaten Mamuju Tengah		Tobadak	Nomor 4 Tahun 2013	11 Januari 2013

NO.	NAMA DAERAH OTONOM	DAERAH INDUK	IBUKOTA	UU PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	2	3	4	5	6
	Total daerah otonom di Pulau Sulawesi: - 6 provinsi - 70 kabupaten - 11 kota				
31.	PROVINSI MALUKU		Ambon	Nomor 20 Tahun 1958	17 Juni 1958
	1. Kabupaten Maluku Tengah		Masohi (Keputusan Mendagri & Otda No. Des. 52/12/5-207, sebelumnya di Amahai)	Nomor 60 Tahun 1958	17 Juli 1958
	2. Kabupaten Maluku Tenggara		Tual	Nomor 60 Tahun 1958	17 Juli 1958
	3. Kabupaten Buru	Maluku Tengah	Namlea	Nomor 46 Tahun 1999	4 Oktober 1999
	4. Kabupaten Maluku Tenggara Barat	Maluku Tenggara	Saumlaki	Nomor 46 Tahun 1999	4 Oktober 1999
	5. Kabupaten Seram Bagian Barat	Maluku Tengah	Dataran Honipopu	Nomor 40 Tahun 2003	18 Desember 2003
	6. Kabupaten Seram Bagian Timur		Dataran Hunimoa	Nomor 40 Tahun 2003	18 Desember 2003
	7. Kabupaten Kepulauan Aru	Maluku Tenggara	Dobo	Nomor 40 Tahun 2003	18 Desember 2003
	8. Kabupaten Maluku Barat Daya	Maluku Tenggara Barat	Moa	Nomor 31 Tahun 2008	21 Juli 2008
	9. Kabupaten Buru Selatan	Buru	Namrole	Nomor 32 Tahun 2008	21 Juli 2008
	10. Kota Ambon		--	Nomor 60 Tahun 1958	17 Juli 1958
	11. Kota Tual	Maluku Tenggara	--	Nomor 31 Tahun 2007	14 Agustus 2007
32.	PROVINSI MALUKU UTARA	PROVINSI MALUKU	Sofifi	Nomor 46 Tahun 1999	4 Oktober 1999
	1. Kabupaten Halmahera Barat (UU No. 1 Tahun 2003, sebelumnya bernama Kabupaten Maluku Utara)		Jailolo (UU No. 1 Tahun 2003, sebelumnya di Kota Ternate)	Nomor 60 Tahun 1958	17 Juli 1958
	2. Kabupaten Halmahera Tengah	Halmahera Barat	Soasiu	Nomor 6 Tahun 1990	15 Agustus 1990
	3. Kabupaten Halmahera Selatan		Labuha	Nomor 1 Tahun 2003	25 Februari 2003
	4. Kabupaten Halmahera Timur	Halmehera Tengah	Maba	Nomor 1 Tahun 2003	25 Februari 2003
	5. Kabupaten Halmahera Utara	Halmahera Barat	Tobelo	Nomor 1 Tahun 2003	25 Februari 2003
	6. Kabupaten Kepulauan Sula		Sanana	Nomor 1 Tahun 2003	25 Februari 2003
	7. Kabupaten Pulau Morotai	Halmahera Utara	Daruba	Nomor 53 Tahun 2008	26 November 2008
	8. Kabupaten Pulau Taliabu	Kepulauan Sula	Bobong	NOmor 6 Tahun 2013	11 Januari 2013

NO.	NAMA DAERAH OTONOM	DAERAH INDUK	IBUKOTA	UU PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	2	3	4	5	6
	9. Kota Ternate ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Ternate berdasarkan PP No. 45 Tahun 1981)	Halmahera Barat	--	Nomor 11 Tahun 1999	20 April 1999
	10. Kota Tidore	Halmahera Tengah	--	Nomor 1 Tahun 2003	25 Februari 2003
Total daerah otonom di Kepulauan Maluku: - 2 provinsi - 17 kabupaten - 4 kota					
33.	PROVINSI PAPUA (UU No. 21 Tahun 2001, sebelumnya bernama Provinsi Irian Jaya)		Jayapura	Nomor 12 Tahun 1969	10 September 1969
	1. Kabupaten Biak Numfor		Biak	Nomor 12 Tahun 1969	10 September 1969
	2. Kabupaten Jayapura		Sentani (Nomor 15 Tahun 2000, sebelumnya di Kota Jayapura)	Nomor 12 Tahun 1969	10 September 1969
	3. Kabupaten Jayawijaya		Wamena	Nomor 12 Tahun 1969	10 September 1969
	4. Kabupaten Merauke		Merauke	Nomor 12 Tahun 1969	10 September 1969
	5. Kabupaten Nabire (PP No 52 Tahun 1996, sebelumnya bernama Kabupaten Paniai)		Nabire	Nomor 12 Tahun 1969	10 September 1969
	6. Kabupaten Kepulauan Yapen (PP No. 40 Tahun 2008, sebelumnya bernama Kabupaten Yapen Waropen)		Serui	Nomor 12 Tahun 1969	10 September 1969
	7. Kabupaten Mimika * (Sebelumnya adalah Kabupaten Administratif Mimika berdasarkan PP No. 54 Tahun 1996)	Fak-Fak	Timika	Nomor 45 Tahun 1999	4 Oktober 1999
	8. Kabupaten Paniai * (Sebelumnya adalah Kabupaten Administratif Paniai berdasarkan PP No. 52 Tahun 1996)	Nabire	Mulia	Nomor 45 Tahun 1999	4 Oktober 1999
	9. Kabupaten Puncak Jaya * (Sebelumnya adalah Kabupaten Administratif Puncak Jaya berdasarkan PP No. 54 Tahun 1996)		Enarotali	Nomor 45 Tahun 1999	4 Oktober 1999
	10. Kabupaten Asmat	Merauke	Asmat	Nomor 26 Tahun 2002	25 Oktober 2002
	11. Kabupaten Boven Digoel		Tanah Merah	Nomor 26 Tahun 2002	25 Oktober 2002

NO.	NAMA DAERAH OTONOM	DAERAH INDUK	IBUKOTA	UU PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	2	3	4	5	6
	12. Kabupaten Keerom	Jayapura	Waris	Nomor 26 Tahun 2002	25 Oktober 2002
	13. Kabupaten Sarmi		Sarmi	Nomor 26 Tahun 2002	25 Oktober 2002
	14. Kabupaten Mappi	Merauke	Kepi	Nomor 26 Tahun 2002	25 Oktober 2002
	15. Kabupaten Pegunungan Bintang	Jayawijaya	Oksibili	Nomor 26 Tahun 2002	25 Oktober 2002
	16. Kabupaten Tolikara		Karubaga	Nomor 26 Tahun 2002	25 Oktober 2002
	17. Kabupaten Waropen	Kepulauan Yapen	Botawa	Nomor 26 Tahun 2002	25 Oktober 2002
	18. Kabupaten Yahukimo	Jayawijaya	Sumohai	Nomor 26 Tahun 2002	25 Oktober 2002
	19. Kabupaten Supiori	Biak Numfor	Sorendiwari	Nomor 35 Tahun 2003	18 Desember 2003
	20. Kabupaten Mamberamo Raya	Sarmi	Barumo	Nomor 19 Tahun 2007	15 Maret 2007
	21. Kabupaten Mamberamo Tengah	Jayawijaya	Kobakma	Nomor 3 Tahun 2008	4 Januari 2008
	22. Kabupaten Yalimo		Elelim	Nomor 4 Tahun 2008	
	23. Kabupaten Lanny Jaya		Tiom	Nomor 5 Tahun 2008	
	24. Kabupaten Nduga		Kenyam	Nomor 6 Tahun 2008	4 Januari 2008
	25. Kabupaten Puncak	Puncak Jaya	Iilaga	Nomor 7 Tahun 2008	
	26. Kabupaten Dogiyai	Nabire	Kigamani	Nomor 8 Tahun 2008	
	27. Kabupaten Intan Jaya	Paniai	Yokatapa	Nomor 54 Tahun 2008	26 November 2008
	28. Kabupaten Deiyai		Waghete	Nomor 55 Tahun 2008	26 November 2008
	29. Kota Jayapura ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Jayapura berdasarkan PP No. 26 Tahun 1979)	Jayapura	--	Nomor 6 Tahun 1993	2 Agustus 1993
34.	PROVINSI PAPUA BARAT (PP No. 24 Tahun 2007, sebelumnya bernama Provinsi Irian Jaya Barat)	PROVINSI PAPUA	Manokwari	Nomor 45 Tahun 1999	4 Oktober 1999
	1. Kabupaten Fak-Fak		Fak-Fak	Nomor 12 Tahun 1969	10 September 1969
	2. Kabupaten Manokwari		Manokwari	Nomor 12 Tahun 1969	10 September 1969
	3. Kabupaten Sorong		Sorong	Nomor 12 Tahun 1969	10 September 1969
	4. Kabupaten Teluk Wondama		Rasiei	Nomor 26 Tahun 2002	11 Desember 2002
	5. Kabupaten Kaimana	Fak-Fak	Kaimana	Nomor 26 Tahun 2002	11 Desember 2002
	6. Kabupaten Raja Ampat	Sorong	Waisai	Nomor 26 Tahun 2002	11 Desember 2002

NO.	NAMA DAERAH OTONOM	DAERAH INDUK	IBUKOTA	UU PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	2	3	4	5	6
	7. Kabupaten Sorong Selatan	Sorong	Teminabuan	Nomor 26 Tahun 2002	11 Desember 2002
	8. Kabupaten Teluk Bintuni	Monokwari	Bintuni	Nomor 26 Tahun 2002	11 Desember 2002
	9. Kabupaten Tambrau	Sorong & Manokwari	Fef	Nomor 56 Tahun 2008	26 November 2008
	10. Kabupaten Maybrat	Sorong	Kumurkek	Nomor 13 Tahun 2009	16 Januari 2009
	11. Kabupaten Manokwari Selatan	Manokwari	Boundij	Nomor 23 Tahun 2012	17 November 2012
	12. Kabupaten Pegunungan Arfak		Ullong	Nomor 24 Tahun 2012	17 November 2012
	13. Kota Sorong ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Sorong berdasarkan PP No. 31 Tahun 1996)	Sorong	--	Nomor 45 Tahun 1999	4 Oktober 1999
Total daerah otonom di Pulau Papua: - 2 provinsi - 40 kabupaten - 2 kota					
PROVINSI TIMOR TIMUR **** (Berdasarkan hasil jajak pendapat yang dilaksanakan oleh PBB pada tahun 1999 dan berdasarkan No. TAP MPR-RI Nomor V/MPR 1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor-Timur, Provinsi Timor Timur tidak lagi menjadi bagian dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia)			DILI	Nomor 7 tahun 1976	17 Juli 1976
	1. Kabupaten Dili ****		Dili	PP Nomor 19 Tahun 1976	30 Juli 1976
	2. Kabupaten Baucau ****		Baucau	PP Nomor 19 Tahun 1976	30 Juli 1976
	3. Kabupaten Manatuto ****		Manaturo	PP Nomor 19 Tahun 1976	30 Juli 1976
	4. Kabupaten Lautem ****		Lautem	PP Nomor 19 Tahun 1976	30 Juli 1976
	5. Kabupaten Viqueque ****		Viqueque	PP Nomor 19 Tahun 1976	30 Juli 1976
	6. Kabupaten Ainaro ****		Ainaro	PP Nomor 19 Tahun 1976	30 Juli 1976
	7. Kabupaten Manufahi ****		Same	PP Nomor 19 Tahun 1976	30 Juli 1976
	8. Kabupaten Cova-Lima ****		Suai	PP Nomor 19 Tahun 1976	30 Juli 1976
	9. Kabupaten Ambeno ****		Pante Macassar	PP Nomor 19 Tahun 1976	30 Juli 1976
	10. Kabupaten Bobonaro ****		Maliana	PP Nomor 19 Tahun 1976	30 Juli 1976
	11. Kabupaten Liquiça ****		Liquiça	PP Nomor 19 Tahun 1976	30 Juli 1976
	12. Kabupaten Ermera ****		Ermera	PP Nomor 19 Tahun 1976	30 Juli 1976

NO.	NAMA DAERAH OTONOM	DAERAH INDUK	IBUKOTA	UU PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	2	3	4	5	6
	13. Kabupaten Aileu ****		Aileu	PP Nomor 19 Tahun 1976	30 Juli 1976

Total daerah otonom di Indonesia 542, terdiri atas:

- 34 provinsi;
- 415 kabupaten (tidak termasuk 1 kabupaten administratif di Provinsi DKI Jakarta); dan
- 93 kota (tidak termasuk 5 kota administratif di Provinsi DKI Jakarta).

Keterangan:

- * Peningkatan status dari Kabupaten Administratif menjadi Kabupaten Otonom.
- ** Peningkatan status dari Kota Administratif menjadi Kota Otonom.
- *** Bukan merupakan daerah otonom.
- **** Tidak lagi menjadi bagian dari Republik Indonesia.